

# **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK TAHUN 2023**

Nama : Muhammad Cahyana  
NIM : 1022010024  
Pembimbing : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2023 tentang fasilitas pengurangan sanksi administrasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam atas penerapan kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) pada tahun 2021 dan 2022 tergolong tidak efektif dikarenakan kurang dari 80%. Hal tersebut disebabkan oleh dampak penyebaran Covid-19 yang melanda Indonesia. Berbeda dengan tahun 2023 menunjukkan hasil sangat efektif yang mencapai 146%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh kebijakan yang diberlakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, II, III mengenai pengurangan sanksi administrasi. Tetapi, pencapaian yang sangat signifikan tersebut tidak lepas dari kendala dari sisi wajib pajak yang tidak mengetahui perkembangan peraturan atau kebijakan perpajakan yang baru sehingga mengakibatkan ketidaktahuan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan untuk mengajukan pengurangan sanksi administrasi.

**Kata Kunci** : Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA), Pajak Penghasilan (PPH), Efektivitas

*(Halaman Sengaja Dikosongkan)*



***THE EFFECTIVENESS OF THE POLICY OF REDUCING TAX  
ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN INCREASING INCOME  
TAX (PPh) REVENUE AT THE PRATAMA GRESIK TAX  
SERVICE OFFICE IN 2023***

Name : Muhammad Cahyana  
Student Identity Number : 1022010024  
Advisor : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A

***ABSTRACT***

*This research aims to determine the level of effectiveness of the Administrative Sanctions Reduction (PSA) policy of Pasal 36 paragraph (1) letter a of the General Provisions of Taxation Law of 2023 regarding the facility of reducing administrative sanctions. This type of research is descriptive qualitative using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is the descriptive analysis method to provide a detailed description of the implementation of the Administrative Sanction Reduction policy in increasing Income Tax (PPh) revenue at the Gresik Primary Tax Service Office (KPP). The results of this research show that the effectiveness of the Administrative Sanctions Reduction (PSA) policy in increasing Income Tax (PPh) revenue in 2021 and 2022 is ineffective because it is less than 80%. This is due to the impact of the spread of Covid-19 that hit Indonesia. In contrast, the year 2023 showed a very effective result that reached 146%. The achievement was due to the policy implemented by the East Java DJP Regional Office I, II, III regarding the reduction of administrative sanctions. However, this significant achievement cannot be separated from the taxpayers who are not aware of the development of new tax regulations or policies, resulting in ignorance of the completeness of the required files to apply for a reduction in administrative sanctions.*

***Keywords*** : *Administrative Sanction Reduction Policy (PSA), Income Tax (PPh), Effectiveness*